

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang bertujuan untuk menganalisis sistem pengendalian internal terhadap piutang tak tertagih untuk mengatasi serta meminimalisir risiko yang telah banyak terjadi. Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan untuk menguji sistem pengendalian internal pada suatu perusahaan seperti persetujuan kredit, penjualan kredit dengan mengangkat masalah yang sejenis.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

N O	PENELITI/JUDUL	VARIABEL	METODOLOGI PENELITIAN	HASIL
1	Hairun Nisa (2017) Analisis Sistem Pengendalian Intern Persetujuan Kredit Dalam Memperkecil Risiko Piutang Tak Tertagih Pada PT Nusa Surya Ciptadana Cabang Martapura	Sistem Pengendalian Intern Persetujuan Kredit, Piutang Tak Tertagih	Deskriptif Kualitatif	Sistem pengendalian belum sesuai PABU. Perusahaan harus memisahkan fungsi penugasan dengan fungsi wewenang dan fungsi otorisasi menghindari kecurangan yang dilakukan karyawan karena berada di fungsi yang sama. Sebelum menyetujui pengajuan kredit nasabah survey harus memperoleh otorisasi dari Kepala Cabang dan Kepala Surveyor untuk mengurangi pemberian kredit nasabah tidak layak.

Lanjutan

2	<p>Gary Hamel (2013)</p> <p>Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Piutang Pada PT. Nusantara Surya Sakti</p>	<p>Pengendalian Intern, Piutang Usaha</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Sistem pengendalian intern kurang efektif namun pada keseluruhan ada beberapa komponen yang sudah sesuai dengan prinsip COSO.</p> <p>Pada penilaian risiko telah berjalan efektif dengan adanya prosedur dan kebijakan kredit untuk mengendalikan risiko kredit.</p> <p>Untuk Informasi dan komunikasi mengenai piutang usaha telah diterapkan dengan efektif, baik informasi disampaikan oleh manajemen kebawah maupun sebaliknya.</p> <p>Aktivitas pemantauan telah dilaksanakan dengan baik oleh perusahaan, setiap bagian melaporkan kinerja masing-masing kepada pusat.</p>
3	<p>Indriwati Tri Wahyuni, Siti Rosyafah, Ali Rasyidi (2015)</p> <p>Penerapan Sistem Akuntansi Penjualan Kredit Dalam Meningkatkan Pengendalian Intern Piutang Tak Tertagih pada Bengkel Bonex</p>	<p>Sistem Akuntansi Penjualan Kredit, Pengendalian Intern, Piutang Tak Tertagih</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Sistem pengendalian intern yang diterapkan kurang efektif, tidak adanya fungsi piutang dan penagihan, masih ada perangkapan tugas yang menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan serta pengawasan.</p> <p>Sistem penjualan kredit yang diterapkan kurang sesuai dengan prosedur penjualan kredit yang sebenarnya.</p>

Lanjutan →

4	<p>Uun Ratdyanti Sasmitha (2018)</p> <p>Prosedur dan Sistem Pengendalian Intern dalam pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Cipta Mulia Desa Bondalem</p>	<p>Prosedur, Sistem Pengendalian Intern, Kredit dan Koperasi</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Prosedur pemberian kredit sudah berjalan dengan baik di lihat dari beberapa dokumen yang terkait. Sistem pengendalian Intern yang diterapkan dalam pemberian kredit sudah berjalan dengan baik sesuai dengan unsur COSO.</p>
5	<p>Dolli Paulina Surupati (2013)</p> <p>Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern atas Penjualan dan Penagihan Piutang pada PT. Laris Manis Utama Cabang Manado</p>	<p>Sistem Pengendalian Intern, Penjualan, Penagihan Piutang</p>	<p>Kualitatif</p>	<p>Unsur pengendalian Intern atas penjualan yang dijalankan kurang efektif, belum terdapat fungsi kredit dalam melakukan penjualan kredit. Dalam pemberian kredit tidak dilakukan survey tentang identitas dari customer. Unsur pengendalian intern atas penagihan piutang sudah efektif, dilihat dari adanya pemisahan fungsi antara fungsi piutang, fungsi penagihan piutang, fungsi pencatatan piutang.</p>

Lanjutan →

6	Jeffry Rolando Taroreh, Jessy D.L Warongan, Treesje Runtu (2016) Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Piutang pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Manado	Sistem Pengendalian Internal, Piutang Usaha	Deskriptif Kualitatif	Sistem pengendalian internal piutang sudah efektif sudah sesuai dengan prinsip COSO. Ditunjang dengan karyawan yang kompeten sehingga kurangnya kesalahan yang signifikan.
---	--	---	-----------------------	--

Ada beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yaitu Gary Hamel (2013), Hairun Nisa (2017), Uun Ratdyanti Sasmita (2018), Jeffry Rolando Taroreh dkk. (2016), Indriwati Tri Wahyuni dkk. (2015), Dolli Paulina Surupati (2013).

Gary (2013), melakukan evaluasi sistem pengendalian intern terhadap piutang pada PT Nusantara Surya Sakti menggunakan COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang terjadi ada beberapa komponen yang sudah efektif dan ada yang kurang efektif dalam perusahaan. Sudah efektif dalam penilaian risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian. Kurang efektif terjadi pada lingkungan pengendalian serta monitoring.

Hairun (2017), melakukan analisis sistem pengendalian intern persetujuan kredit dalam memperkecil risiko piutang tak tertagih pada PT. Nusa Surya Ciptadana Cabang Martapura menggunakan PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum) menyatakan kurang efektifnya perusahaan dalam sistem pengendalian

intern yang belum sesuai dengan PABU. Kurang efektifnya sistem pengendalian bisa berdampak buruk terhadap piutang tak tertagih.

Uun (2018), melakukan analisis prosedur dan sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Cipta Mulia Desa Bondalem penerapan menggunakan komponen pengendalian COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*). Menyatakan bahwa prosedur pemberian kredit sudah memadai dilihat dari beberapa dokumen yang digunakan terkait prosedur pemberian kredit seperti catatan akuntansi untuk pemberian kredit, aliran prosedur (*flowchart*). Dalam sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam pemberian kredit sudah efektif serta berjalan dengan baik karena dilihat dari komponen pengendalian hasilnya menyatakan memadai secara keseluruhan.

Jeffry dkk. (2016), melakukan evaluasi penerapan sistem pengendalian internal piutang pada PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Manado menerapkan COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*). Menyatakan bahwa sistem pengendalian internal sudah berjalan efektif, karena sudah sesuai dengan komponen pengendalian serta di tunjangnya karyawan yang kompeten.

Wahyuni dkk. (2015), melakukan penerapan sistem akuntansi penjualan kredit dalam meningkatkan pengendalian intern piutang tak tertagih pada bengkel Bonex. Menyatakan penerapan sistem pengendalian intern kurang efektif dilihat dari sistem penjualan kredit tidak sesuai prosedur karena adanya perangkapan

fungsi yang melakukan tugas fungsi lain sehingga pengelolaannya kurang baik. Dimana dalam sistem pengendalian yang berlaku perusahaan menetapkan membagi tugas masing masing guna mempermudah pengawasan.

Dolli Paulina (2013), melakukan evaluasi peenerapan sistem pengendalian intern atas penjualan dan penagihan piutang pada PT. Laris Manis Utama Cabang Manado menerapkan unsur unsur pokok sistem pengendalian intern menurut Mulyadi. Menyatakan kurang efektif nya sistem pengendalian internal dilihat dari beberapa unsur pengendalian intern yang belum efektif.

Dari penjelasan penelitian terdahulu tersebut yang dilakukan oleh Gary Hamel (2013), Hairun Nisa (2017), Uun Ratdyanti Sasmitha (2018), Jeffry Rolando Taroreh dkk. (2016), Indriwati Tri Wahyuni dkk. (2015), Dolli Paulina Surupati (2013), mayoritas penelitian mengevaluasi dalam penerapan sisitem pengendalian internal di dalam perusahaan yang di teliti. Persamaannya adalah sama sama mengkaji tentang sistem pengendalian internal pada piutang. Perbedaannya adalah pada objek atau tempat yang dilakukan yaitu penelitian ini dilakukan di Koperasi Wanita “Teratai” yang berada di Desa Balongjeruk Kec. Kunjang Kab. Kediri.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Kata efektif dalam bahasa Inggris berarti *effective*, artinya sesuatu yang dilakukan dengan baik atau keberhasilan. Pada dasarnya efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang digunakan sebagai acuan tentang tercapainya sebuah tujuan atau keberhasilan yang diharapkan secara maksimal. Dimana pencapaian target yang dilihat dari ukuran kualitas, kuantitas serta waktu yang menyatakan seberapa besar target yang telah dicapai.

Efektivitas merupakan pencapaian keberhasilan yang dilakukan oleh organisasi maupun perserorangan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan cara tertentu. Dikatakan efektif apabila tujuan sebuah kegiatan yang dicapai mengalami banyaknya keberhasilan sesuai dengan yang diharapkan. Efektivitas sangat berpengaruh pada keberlangsungan suatu kegiatan.

Menurut Mahmudi (2011: 22):

“efektivitas adalah dukungan antara pengeluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai, pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau paket kebijakan.

Menurut Bungkaes (2013: 45):

“Efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektivitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud efektivitas. Bagaimanapun devinisi efektivitas berkaitan dengan pendekatan umum”.

2.2.2 Sistem

a. Pengertian Sistem

Secara umum sistem merupakan sebuah kesatuan dari berbagai prosedur maupun unsur-unsur yang digunakan dalam berbagai bidang yang saling berhubungan dan saling berkaitan dalam pelaksanaan suatu tujuan atau kegiatan dari perusahaan dalam mencapai tujuan tertentu secara efektif yang bertujuan untuk membantu mempermudah pengambilan keputusan.

Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat *repetitive* untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki karakteristik berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi, dan berulang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. *Thermostat* dan proses pengendalian suhu tubuh merupakan contoh sistem.

Pengertian sistem menurut para ahli sebagai berikut:

Menurut Mulyadi (2016: 4):

“Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan”.

Menurut Romney & Steinbart (2015: 3):

“Sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan dimana sistem biasanya terbagi dalam sub system yang lebih kecil yang mendukung sistem yang lebih besar”.

Menurut Azhar Susanto (2013: 22):

“Sistem adalah kumpulan dari sub sistem/ bagian/ komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu”.

b. Karakteristik Sistem

Karakteristik sistem adalah sebagai berikut:

1. Komponen,
2. Batasan sistem
3. Lingkungan luar sistem
4. Penghubung sistem
5. Masukan
6. Keluaran
7. Pengolahan sistem
8. Sasaran dan tujuan sistem

2.2.3 Koperasi

Koperasi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang berbentuk badan usaha atau organisasi yang dilakukan sekelompok orang guna memberikan kemudahan bagi orang lain untuk kepentingan bersama yang dilakukan berdasarkan asas kekeluargaan yang bukan untuk mencari keuntungan atau profit tapi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya.

Koperasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah dan tidak bermaksud mencari untung.

Pada umumnya, koperasi dijalankan oleh anggotanya sendiri, untuk badan hukum maupun perseorang dalam mendirikan koperasi dibutuhkan modal usaha serta kemajuan kinerja koperasi didapat oleh para anggota aktif.

Sehingga dalam bidang ekonomi bisa meningkatkan serta bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama.

2.2.4 Pengendalian Internal

a. Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Krismiaji (2010) dalam Buku Sistem Infomasi Akuntansi:

“Pengendalian intern adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen”.

Menurut (V.Rama & L.Jones, 2011) dalam Buku Sistem Informasi Akuntansi:

“Pengendalian Internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh dewan direksi entitas, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait dengan pencapaian sasaran kategori sbegai berikut: efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku”.

Menurut model COSO, internal control adalah suatu proses, melibatkan seluruh anggota organisasi, dan memiliki tiga tujuan utama, yaitu efektifitas dan efisiensi Koperasi, mendorong kehandalan laporan keuangan, dan dipatuhinya hukum dan peraturan yang ada. Pengendalian internal memberikan jaminan yang wajar, bukan yang absolute, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas pengendalian, membuat proses ini menjadi tidak sempurna.

Sistem pengendalian internal sering di sebut *control intern* yang artinya proses yang bisa di pengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi

informasi yang bisa membentuk sebuah organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Selain itu, sistem pengendalian internal salah satu cara dalam mengawasi, mengarahkan dan mengukur sumberdaya suatu organisasi. Selain itu juga berguna untuk acuan atas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku yang digunakan seperti aspek operasi, administrasi yang digunakan untuk pengurus, pengawas dan anggota koperasi. Dalam sisi lain, sistem pengendalian internal juga digunakan untuk memberikan penilaian keakuratan informasi dalam laporan keuangan serta adanya peningkatan efektivitas. Selain itu, pengendalian internal yang efektif dapat membantu perusahaan mengarahkan kegiatan operasi mereka dan mencegah pencurian serta tindakan penyalahgunaan lainnya.

Suatu organisasi juga harus dikendalikan, yaitu harus ada perangkat-perangkat untuk memastikan bahwa tujuan strategis organisasi dapat tercapai. (Anthony & Govindarajan, 2012)

b. Struktur Pengendalian Internal

Struktur pengendalian internal (*internal control structure*) merupakan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan yang layak bahwa tujuan khusus organisasi akan dicapai.

Struktur pengendalian intern ini memiliki tiga elemen, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian. Lingkungan pengendalian menggambarkan efek kolektif dari berbagai faktor pada penetapan, peningkatan, atau penurunan efektivitas prosedur dan kebijakan khusus. Faktor-faktor

tersebut berupa: komitmen terhadap integritas dan nilai etika, filosofi dan gaya operasi manajemen, struktur organisasi, komite audit dewan direktur, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab, praktik dan kebijakan sumberdaya manusia, berbagai pengaruh eksternal lainnya yang mempengaruhi kegiatan dan praktik organisasi.

2. Sistem Akuntansi. Sistem akuntansi terdiri atas metode dan catatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, menggolongkan, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi perusahaan dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan kewajiban terkait. Sistem akuntansi yang efektif memberikan dasar yang memadai untuk penetapan metode dan catatan yang akan berfungsi sebagai berikut: mengidentifikasi dan mencatat seluruh transaksi sah, menguraikan secara tepat waktu transaksi bisnis secara rinci sehingga memungkinkan klasifikasi transaksi secara tepat untuk pelaporan keuangan, mengukur nilai transaksi secara tepat sehingga memungkinkan pencatatan sebesar nilai moneterinya dalam laporan keuangan, menentukan periode waktu terjadinya transaksi sehingga memungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi yang tepat, menyajikan secara tepat transaksi dan pengungkapan lain yang terkait dalam laporan keuangan.
3. Prosedur Pengendalian. Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditambahkan ke lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan

jaminan yang layak bahwa tujuan khusus organisasi akan dicapai. Cakupan prosedur pengendalian tersebut adalah sebagai berikut: otorisasi yang tepat terhadap transaksi dan aktivitas, pemisahan tugas yang mengurangi peluang bagi seseorang melakukan kesalahan dalam tugas rutusnya yaitu dengan menempatkan orang berbeda pada fungsi otorisasi transaksi serta pencatatan transaksi, perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan untuk membantu menjamin pencatatan transaksi secara tepat, penjagaan yang memadai terhadap akses dan penggunaan aktiva dan catatan, pengecekan independen terhadap kinerja dan penilaian yang tepat terhadap nilai yang tercatat.

c. Klasifikasi Pengendalian Internal

Prosedur pengendalian khusus yang digunakan dalam sistem ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu:

1. Menurut tujuannya, pengendalian dikelompokkan menjadi 3, yaitu pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif.

Pengendalian preventif dimaksudkan untuk mencegah masalah sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi. Pengendalian detektif untuk menemukan masalah segera setelah masalah tersebut terjadi. Pengendalian korektif dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian detektif.

2. Menurut waktu pelaksanaannya, pengendalian dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengendalian umpan balik (*feedback control*) dan pengendalian dini (*feedforward control*).

Pengendalian umpan balik adalah pengendalian yang masuk dalam kelompok pengawasan detektif, karena jenis pengawasan ini mengukur sebuah proses dan menyesuaikannya apabila terjadi penyimpangan dari rencana semula. Pengendalian dini adalah pengendalian yang termasuk dalam kelompok pengendalian preventif, karena jenis pengawasan ini memonitor proses dan input untuk memprediksi kemungkinan masalah yang akan terjadi. Jika masalah dapat diidentifikasi sebelum masalah tersebut muncul, maka penyesuaian dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah tersebut.

3. Menurut obyek yang dikendalikan, pengawasan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengawasan umum dan pengawasan aplikasi.

Pengawasan umum adalah pengawasan yang dirancang untuk menjamin bahwa lingkungan pengawasan organisasi mantap dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas pengawasan aplikasi. Pengawasan aplikasi adalah pengawasan yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan membetulkan kesalahan transaksi saat transaksi tersebut diproses.

4. Menurut tempat implementasi dalam siklus pengolahan data, pengawasan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengawasan input, pengawasan proses, dan pengawasan output.

Pengawasan input dirancang untuk menjamin bahwa hanya data yang sah (*valid*), akurat, dan diotorisasi saja yang dimasukkan ke dalam proses. Pengawasan proses dirancang untuk menjamin bahwa semua transaksi diproses secara akurat dan lengkap dan semua *file* dan *record* di-*update* secara tepat. Pengawasan output dirancang untuk menjamin bahwa keluaran sistem diawasi dengan semestinya.

d. Tujuan Pengendalian Internal

Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang memadai bahwa: aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis, informasi bisnis akurat, dan karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Pengendalian internal dapat melindungi aset perusahaan dari pencurian, kecurangan, penyalahgunaan, atau kesalahan penempatan. Salah satu pelanggarannya adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Kecurangan karyawan (*employee fraud*) adalah tindakan yang disengaja untuk menipu perusahaan demi keuntungan pribadi.

Informasi yang akurat sangat penting untuk menjalankan perusahaan dengan sukses. Perlindungan aset serta informasi yang akurat seringkaliberjalan beriringan. Alasannya adalah karyawan yang mencoba melakukan penipuan juga harus menyesuaikan pencatatan akuntansi agar dapat menyembunyikan kecurangan yang dilakukannya.

Perusahaan harus patuh pada hukum, peraturan, serta standar pelaporan keuangan yang berlaku.

e. Elemen-Elemen Sistem Pengendalian

Setiap sistem memiliki elemen-elemen yang menjadi penyusun dalam sistem itu sendiri. Sistem pengendalian mempunyai beberapa elemen, (Darmansyah 2015) yaitu:

1. Pelacak (*detector*) atau sensor, suatu perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan.
2. Penilai (*assessor*), suatu perangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa actual dengan cara membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi.
3. Umpan balik (*effector*), suatu perangkat yang mengubah perilaku jika *assessor* mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut.
4. Jaringan komunikasi, perangkat yang meneruskan informasi antara *detector* dan *assessor* dan antara *assessor* dan *effector*.

2.2.5 COSO (*Committee of Sponsoring Organization*)

COSO adalah sebuah organisasi swasta yang beranggotakan *the American Accounting Association (AAA)*, *AICPA*, *the Institute of Internal Auditor (IIA)*, *the Institute of Management Accountants (IMA)* dan *the Financial Executives Institute (FEI)* yang dibentuk pada tahun 1985. Misi dari COSO adalah memperbaiki dan meningkatkan kualitas laporan keuangan entitas melalui etika bisnis, pengendalian internal yang efektif dan corporate governance.

Selanjutnya pada tahun 1992 COSO menerbitkan “kerangka kerja pengendalian internal” dan mengalami penyempurnaan penjelasan pada tahun 2013. Pengendalian internal menurut COSO adalah proses yang melibatkan seluruh anggota organisasi. Model pengendalian intern ini menetapkan pengendalian intern sebagai proses yang diterapkan oleh dewan direktur, manajemen, dan untuk memberikan jaminan yang cukup bahwa tujuan dapat dicapai. Tujuannya yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan dan kepatuhan hukum serta peraturan.

Komponen- komponen model pengendalian intern menurut COSO ada 5 yaitu lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), kegiatan pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), kegiatan pemantauan (*monitoring activities*): (Krismiaji, 2010)

1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*), merupakan struktur yang menyediakan dasar guna terlaksananya pengendalian internal dalam sebuah organisasi. Tulang punggung sebuah perusahaan adalah karyawan, yang meliputi atribut individu seperti integritas, nilai etika, kompetensi. Karyawan dan lingkungan tempat karyawan tersebut bekerja, mereka merupakan mesin penggerak organisasi dan merupakan fondasi untuk komponen lainnya.

- a. Integritas dan nilai etika

Integritas dan nilai etika sangat penting, sehingga manajemen harus memperlihatkan integritas dan perilaku sesuai standar etika,

mengkomunikasikan kepada karyawan/ pengurus tentang aturan dan setiap orang memiliki tanggungjawab untuk melaporkan tentang semua pelanggaran yang bertindak tidak etis.

b. Komitmen dan kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi meliputi pertimbangan tentang pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman untuk pengembangan kompetensi guna pengendalian internal berjalan dengan baik.

c. Pelaksanaan tanggung jawab tata kelola

d. Dewan direksi dan komite audit

e. Struktur organisasi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam pengembangan karyawan

Struktur organisasi dituangkan dalam bagan organisasi untuk menggambarkan kewenangan dan pelaporan sehingga bisa dinilai bagaimana lingkungan tersebut berdampak terhadap efektifitas kebijakan dan prosedur pengendalian.

f. Kebijakan sumber daya manusia dan prosedurnya

2. Penilaian Risiko (*risk assessment*), organisasi harus menyadari dan waspada terhadap berbagai risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan serangkaian tujuan, yang terintegrasi dengan kegiatan penjualan, produksi, pemasaran, keuangan, dan kegiatan lainnya sehingga organisasi dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Organisasi harus menetapkan mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko-risiko terkait.

- a. Penetapan tujuan dalam pelaporan keuangan dan kepatuhan dengan jelas sehingga risiko-risiko terkait bisa diidentifikasi dan di analisis
- b. Tujuan disetiap proses

Organisasi menetapkan tujuan dengan kejelasan untuk mengidentifikasi dan penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan.

- c. Mengelola perubahan

Organisasi menilai perubahan yang signifikan yang bisa mempengaruhi sistem pengendalian internal

3. Kegiatan Pengendalian (*control activities*), perusahaan harus menetapkan prosedur dan kebijakan pengendalian dan melaksanakannya, untuk membantu menjamin bahwa manajemen dapat menetapkan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menghadapi ancaman-ancaman yang muncul dan meminimalkan risiko, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif.
 - a. Dokumen dan catatan yang memadai
 - b. Pemisahan tugas, mencakup pembebanan tugas pelaksanaan transaksi
 - c. Otorisasi yang tepat atas transaksi dan aktivitas
 - d. Pengendalian fisik atas asset dan catatan
 - e. Pengecekan terhadap pekerjaan secara independen
4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*), sistem informasi dan komunikasi mengitari kegiatan pengawasan. Sistem tersebut memungkinkan karyawan organisasi untuk memperoleh dan

menukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan organisasi. Manajemen membutuhkan informasi yang relevan dan berkualitas baik dari internal atau eksternal guna mendukung komponen pengendalian internal lainnya.

a. Kualitas informasi

Menggunakan dan memperoleh informasi yang berkualitas dan relevan untuk mendukung fungsi pengendalian internal.

b. Efektivitas komunikasi

Organisasi mengkomunikasikan informasi termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk mendukung fungsi pengendalian internal

Komunikasi meliputi penyediaan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab individu/ karyawan

5. Kegiatan Pemantauan (*monitoring activities*), seluruh proses bisnis harus dipantau, dan dilakukan modifikasi seperlunya. Dengan cara ini, sistem akan bereaksi secara dinamis, yaitu berubah jika kondisinya menghendaki perubahan. Dalam arti lain kegiatan ini mencakup
 - a. Manajemen harus mengawasi dan memantau evaluasi berkelanjutan memastikan bahwa pengendalian organisasi berfungsi sebagaimana mestinya.
6. evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi yang digunakan untuk memastikan tiap-tiap komponen pengendalian berfungsi sebagai mana mestinya.
 - a. Manajemen harus mengawasi dan memantau evaluasi berkelanjutan memastikan bahwa pengendalian organisasi berfungsi sebagaimana mestinya.

2.2.6 Prinsip-prinsip pengendalian internal

Kerangka pengendalian internal COSO (2013) menyatakan prinsip yang merepresentasikan konsep-konsep fundamental yang terkait dengan tiap-tiap komponen pengendalian internal. Prinsip-prinsip pengendalian internal dirumuskan langsung dari komponen pengendalian internal, sehingga entitas akan mencapai pengendalian internal secara efektif dengan menerapkan semua prinsip. Semua prinsip pengendalian internal terkait dengan tujuan-tujuan entitas, baik dalam kategori operasi, pelaporan keuangan, maupun kepatuhan.

Berikut adalah prinsip-prinsip pengendalian internal dimaksud:

Lingkungan pengendalian:

1. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika.
2. Dewan komisaris (atau dewan pengawas) menunjukkan independensi dari manajemen dan melaksanakan pengawasan atas pengembangan dan pelaksanaan pengendalian internal.
3. Di bawah pengawasan dewan komisaris (atau dewan pengawas), manajemen menetapkan struktur organisasi, garis pelaporan, serta wewenang dan tanggung jawab yang tepat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
4. Organisasi menunjukkan komitmen dalam merekrut, mengembangkan, dan mempertahankan individu-individu yang kompeten sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

5. Organisasi memberikan dukungan bagi individu-individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian internal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian risiko:

1. Organisasi menetapkan tujuan-tujuan yang jelas agar identifikasi dan penilaian risiko terkait tujuan-tujuan itu bisa dilakukan.
2. Organisasi melakukan identifikasi risiko atas pencapaian tujuan entitas secara menyeluruh dan dan melaksanakan analisis risiko sebagai landasan untuk menetapkan manajemen risiko.
3. Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan (fraud) dalam melakukan penilaian risiko atas pencapaian tujuan
4. Organisasi melakukan identifikasi dan penilaian atas perubahan-perubahan yang mungkin berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian internal.

Aktivitas pengendalian:

1. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas-aktivitas pengendalian yang akan memberikan kontribusi dalam meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan hingga mencapai tingkat toleransi risiko yang bisa di terima
2. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas-aktivitas pengendalian umum atas teknologi pendukung pencapaian tujuan

3. Organisasi memberlakukan aktivitas-aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan melalui prosedur yang menjabarkan kebijakan menjadi tindakan

Informasi dan komunikasi:

1. Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lain berfungsi sebagai mana mestinya
2. Organisasi melakukan komunikasi informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal, yang diperlukan untuk mendukung pengendalian internal
3. Organisasi menjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal terkait hal-hal yang mempengaruhi berfungsinya komponen-komponen pengendalian internal lainnya

Kegiatan pemantauan:

1. Organisasi memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi, baik yang dilakukan secara terus-menerus (berkelanjutan) maupun yang dilakukan secara terpisah untuk memastikan apakah komponen-komponen pengendalian internal berfungsi
2. Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan-kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang

bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen puncak dan pengawas, sebagaimana mestinya

Prinsip-prinsip pengendalian internal diatas digunakan sebagai indikator untuk menilai efektifitas pengendalian internal.

2.2.6 Piutang

a. Pengertian Piutang

Istilah piutang mengacu pada sejumlah tagihan yang akan diterima oleh perusahaan (umumnya dalam bentuk kas) dari pihak lain, baik sebagai akibat penyerahan barang dan jasa secara kredit (untuk piutang pelanggan yang terdiri atas piutang usaha dan memungkinkan piutang wesel), memberikan pinjaman (untuk piutang karyawan, piutang debitur yang biasanya langsung dalam bentuk piutang bunga), maupun akibat kelebihan pembayaran kas kepada pihak lain (untuk piutang pajak). (Hery, 2012)

Sebagian besar piutang timbul dari penyerahan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada umumnya pelanggan akan menjadi tertarik untuk membeli sebuah produk yang ditawarkan secara kredit oleh perusahaan (penjual), dan hal ini rupanya juga menjadi salah satu trik bagi perusahaan untuk meningkatkan besarnya omset penjualan yang akan tampak dalam laporan laba ruginya.

Menurut Bastian (2011) dalam Buku Sistem Akuntansi Sektor Publik:

“Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah/ yang menjadi hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai

perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.”

Menurut Dwi Martani (2016) dalam buku Akuntansi Keuangan Menengah:

“Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Klaim didasarkan pada perjanjian tertulis yang sering disebut wesel tagih.”

Selain itu, piutang dapat timbul dari berbagai kegiatan lainnya seperti pemberian pinjaman kepada karyawan, pemberian uang muka kepada entitas pemerintahan yang lebih rendah, penjualan aktiva tetap yang sudah tidak digunakan dalam entitas pemerintah, dan pengakuan akuntansi karena dasar waktu.

Piutang adalah salah satu transaksi aktiva lancar yang termasuk jenis transaksi dalam dunia akuntansi yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa atau pemberian kredit berupa penagihan kepada konsumen atau pihak lain yang berhutang.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan prosedur piutang secara umum:

1. Memberikan prosedur yang baku atas aktivitas yang berkaitan dengan perolehan informasi mengenai piutang, mulai dari pengakuan sampai proses penyelesaian piutang.
2. Memberikan informasi yang tepat mengenai jumlah piutang yang dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga dapat diperhitungkan seberapa besar penyisihan kerugian piutang.

3. Sebagai informasi pendukung bagi pemerintah daerah dalam menginformasikan jumlah piutang yang dimilikinya kepada pihak ketiga.

2.2.7 Piutang Tak Tertagih

Dalam akuntansi terdapat transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Sebagian pelanggan mungkin tidak akan membayar utang mereka. Dengan demikian, sebagian piutang menjadi tak tertagih. Tanpa melihat kebijakan yang dipakai dalam memberikan kredit dalam prosedur penagihan yang digunakan, sebagian dari penjualan secara kredit tidak akan bisa ditagih. Beban operasi yang dicatat dari piutang tak tertagih di sebut beban piutang tak tertagih (*bad debt expense*).

Terdapat dua metode akuntansi untuk piutang tak tertagih yaitu metode penghapusan langsung dan metode penyisihan:

1. Metode penghapusan langsung (*direct write-off method*), mencatat beban piutang tak tertagih hanya pada saat suatu piutang dianggap benar-benar tak tertagih.
2. Metode penyisihan (*allowance method*), mencatat beban piutang tak tertagih dengan mengestimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode akuntansi.

Metode penghapusan langsung, untuk metode ini tidak ada jurnal yang dibuat sampai suatu akun khusus telah ditetapkan secara pasti tidak tertagih. Kemudian

kerugian tersebut dicatat dengan mengkredit piutang usaha dan mendebet Kerugian Piutang sebesar nilai perkiraan piutang yang tak tertagih.

Metode penyisihan/ cadangan menggunakan estimasi atau perkiraan piutang tak tertagih dari semua penjualan kredit atau dari total piutang usaha yang beredar. Perusahaan setiap akhir tahun harus menentukan berapa estimasi besarnya piutang tak tertagih yang akan diakui dan dilaporkan sebagai kerugian piutang pada periode berjalan. Penghitungan estimasi ini biasanya dibuat atas dasar presentase penjualan atau presentase piutang yang beredar.

Faktor-faktor penyebab piutang tak tertagih yang bisa mempengaruhi koperasi adalah faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Internal, berupa lemahnya sistem administrasi kredit, lemahnya sistem pengawasan kredit, lemahnya sistem informasi kredit dan penyimpanan atau kecurangan yang dilakukan pada saat proses pelaksanaan kredit.
2. Faktor Eksternal, berupa faktor persaingan yang sangat ketat, keadaan yang kurang memadai, perekonomian yang kurang mendukung perkembangan debitur, penggunaan kredit di luar objek pembiayaan.

Dari faktor-faktor diatas piutang tak tertagih yang terjadi di koperasi bisa menyebabkan serta mempengaruhi laba koperasi.

2.3 Kerangka Konseptual

Koperasi Wanita “Teratai” merupakan salah satu koperasi jasa, dimana menawarkan simpan pinjam untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat. Dalam kegiatan simpan pinjam memungkinkan menimbulkan adanya piutang tak tertagih. Piutang tersebut diharapkan berjalan lancar sesuai dengan jangka waktu yang di tentukan. Dalam hal ini, di perlukan sistem pengendalian internal terhadap piutang agar mengurangi risiko piutang tak tertagih.

Berikut adalah kerangka konseptual yang menggambarkan pengelolaan pengendalian internal pada piutang tak tertagih, diharapkan sistem pengendalian internal bisa mengurangi adanya piutang tak tertagih.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Dari kerangka konseptual diatas, dalam menjalankan suatu kegiatan usaha diperlukan sistem pengendalian internal guna mengurangi risiko yang akan

terjadi. Seperti halnya pada Koperasi Wanita “Teratai” diperlukan sistem pengendalian internal dalam meminimalisir piutang tak tertagih.

Komponen sistem pengendalian internal menurut COSO:

1. Lingkungan pengendalian (*control environment*), merupakan landasan dari seluruh komponen pengendalian internal agar membentuk organisasi yang berstruktur dan disiplin.
2. Penilaian risiko (*risk assessment*), merupakan sebuah proses yang dinamis dan interaktif guna mengidentifikasi risiko sehingga jika terjadi risiko manajemen menemukan cara agar bisa meminimalisir risiko yang terjadi.
3. Kegiatan pengendalian (*control activities*), merupakan tindakan-tindakan yang diberikan melalui kebijakan dan prosedur dalam membantu dan mengarahkan manajemen untuk mengurangi risiko.
4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*), menjelaskan informasi yang dibutuhkan manajemen untuk membantu dalam pelaksanaan pengendalian internal, baik informasi berasal dari sumber internal maupun eksternal.
5. Kegiatan pemantauan (*monitoring activities*), merupakan kegiatan rutin untuk mengevaluasi kinerja dalam memastikan pengendalian internal yang bersifat berkelanjutan.

Jika sistem pengendalian internal berjalan dengan baik maka efektivitas sistem pengendalian internal akan di peroleh hasil analisis yang baik guna membantu dalam kelancaran kegiatan koperasi.